

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM GERAKAN
NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (GN RHL)
DI KABUPATEN SIJUNJUNG SUMATERA BARAT
(2003 - 2006)**

TESIS

Oleh :

FEBRINA TRISUSILA PUTRI

BP 07 206 013



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL) di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat (2003 – 2006)

Oleh : Febrina Trisusila Putri
(Dihawah bimbingan Helmi dan Fuad Madarisa)

RINGKASAN

Laju deforestasi hutan selama sepuluh tahun terakhir diperkirakan 2,83 juta hektar pertahun bahkan Lembaga riset Dunia (World Resource Institute) menyebutkan 3,4 juta hektar pertahun. Degradasi tersebut disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, *illegal logging*, penjarahan, perambahan serta ekses kapasitas industri pengolahan kayu yang melebihi persediaan bahan baku lestari. Akibatnya terjadi kerusakan hutan yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga sulitnya tercapai pengelolaan hutan secara lestari. Kerusakan hutan dan lahan tersebut telah mengakibatkan bencana alam yang menimbulkan kerugian besar berupa kerusakan infrastruktur dan aset pembangunan serta terganggunya tata kehidupan masyarakat (Departemen Kehutanan, 2003).

Untuk mengimbangi laju deforestasi tersebut pemerintah mencanangkan kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai gerakan moral berskala nasional yang terencana dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait baik pemerintah, maupun badan usaha milik pemerintah/swasta, TNI, LSM dan masyarakat. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL) merupakan gerakan moral berskala

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan Indonesia merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Congo, mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyimbang iklim global. Dalam tataran global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki tempat kedua setelah Colombia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Sekitar 120,35 juta hektare hutan Indonesia selama tiga dekade terakhir memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja, mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Strategi konservasi hutan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 antara lain :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,
2. Pengawasan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2000).

Perencanaan pembangunan kehutanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005 – 2009 menetapkan visi pembangunan sejalan

dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu "Terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuan rakyat". Dari visi tersebut ditetapkan sasaran jangka menengah sebagai berikut :

1. Tercapainya desentralisasi pembangunan kehutanan yang didukung oleh stakeholder dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pelestarian sumber daya hutan.
2. Pemberantasan pencurian kayu dan perdagangan kayu illegal.
3. Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari antara lain dengan membangun minimal satu unit pengelolaan hutan di tiap provinsi.
4. Menambah pembangunan hutan tanaman sehingga mencapai seluas 5 juta hektar dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 5 juta hektar.
5. Pembentukan 20 unit taman nasional model.
6. Revitalisasi dan pengembangan hutan rakyat, terutama di luar pulau Jawa,
7. Revitalisasi dan pengembangan DAS Prioritas agar berfungsi optimal.
8. Pengembangan aneka usaha kehutanan non kayu dan jasa lingkungan secara komersil.
9. Peningkatan penyerapan tenaga kerja 3 – 4 %.
10. Pengukuhan kawasan hutan seluas 12 juta hektar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di Bab V maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahapan proses perencanaan GN RHL terbagi menjadi dua kategori, yaitu : a. Peserta GN RHL, dan b. Pelaksana GN RHL (Dinas Kehutanan). Peserta GN RHL mengikuti :
 - a) Sosialisasi,
 - b) Pembentukan kelompok tani.
 - c) Pengusulan lokasi.
 - d) Penyusunan rancangan teknis kegiatan.
 - e) Pelatihan kelompok tani.

Sementara tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan adalah :

- a) Penyusunan Rencana Kehutanan Lima Tahunan.
- b) Rencana Teknik Tahunan.
- c) Penyusunan rancangan teknis kegiatan.
- d) Sosialisasi.
- e) Pelatihan kelompok tani.

Partisipasi masyarakat tinggi pada sosialisasi (dalam kawasan 72,34 % dan luar kawasan 89,47 %), pembentukan kelompok

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Hasuntaha.** 2006. Kembali Belajar Kepada Rakyat : Pengelolaan Hutan dan Kawasan dengan Kearifan Lokal. <http://www.jejakkelaria.wordpress.com>. Download 12 Maret 2008.
- Arsyad, Lineolin.** 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. PT BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Agam Kuantan.** 2007. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL). <http://bpdasagamkuantan.com>. Download 24 Februari 2008.
- Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Agam Kuantan.** 2008. Protret Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. <http://bpdasagamkuantan.com>. Download 24 November 2008.
- Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLHD) Jabar.** 2003. Social Forestry. <http://bplhdjabar.go.id>. Download 12 Maret 2008.
- BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.** 2007. Sawahlunto/Sijunjung dalam Angka 2006/2007. BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
- Cahyono, S. Andy.** 2005. Tinjauan Faktor Kelayakan, Keuntungan dan Kesinambungan pada Pengembangan Hutan Rakyat. Info Sosial Ekonomi. <http://www.dephut.com> Download tanggal 24 Februari 2008.
- Chamber, Robert.** 1987. "Pembangunan Desa", Mulai dari Belakang. LP3ES. Jakarta.
- Conyers, Diana dan Peter Hill.** 1994. An Introduction To Development Planning In The Third World. John Willey and Sons. Tanpa alamat.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan.** 2000. Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan.** 2003. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Kegiatan Rehabisasi dan Penghijauan. Direktorat Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. Jakarta.
- Departemen Kehutanan.** 2005. Rencana Strategis Kementerian Lembaga/Negara (Renta-KL) Departemen Kehutanan 2005 – 2009. Departemen Kehutanan. Jakarta.